

BAB I

PENDAHULUAN

1.7 Latar Belakang

Stunting atau gagal tumbuh pada anak merupakan salah satu masalah gizi kronis yang menjadi perhatian global. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar pertumbuhan anak seusianya. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif dan menurunkan produktivitas ketika anak tersebut dewasa. Masalah gizi saat ini menjadi isu serius yang dihadapi Indonesia, yang ditunjukkan dengan prioritas penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak. Hal ini selaras dengan tujuan SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan global "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" yang menjadi landasan pelaksanaan SDGs di tingkat nasional.

Masalah gizi kronis pada anak usia dini ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak pada usia yang sama (Kementerian Kesehatan, 2018). Ramayulis dkk (2018) menyebutkan stunting atau perawakan pendek merupakan kondisi pada bayi 0-11 bulan dan anak kecil 12-59 bulan yang tidak mampu tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya, sehingga anak Terlalu pendek untuk anak seusianya. Menurut Ramayulis dkk (2018), stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain praktik perawatan gizi yang buruk, termasuk kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum, selama, dan setelah kehamilan.

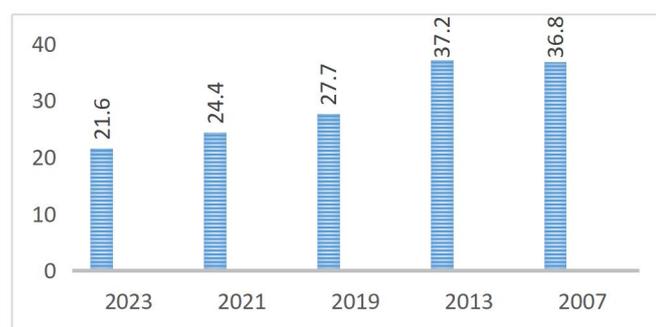
Stunting merupakan ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia. Data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi dan masih jauh dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Penyebab stunting antara lain pola asuh yang buruk, pelayanan ibu hamil yang tidak memadai, hambatan akses keluarga terhadap makanan bergizi, hambatan terhadap air bersih dan sanitasi, serta penyakit menular pada anak. Selain itu, ada pula alasan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Carolina, 2021). Kondisi stunting tidak dapat diubah, sehingga upaya signifikan dapat dilakukan untuk mencegah malnutrisi dengan mencegah stunting (Organisasi Kesehatan Dunia, 2014).

Data terkini Studi Status Gizi di Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Jika data prevalensi stunting tahun 2023 dibandingkan dengan data prevalensi stunting tahun 2007, maka secara keseluruhan akan terjadi penurunan sebesar 15,2% dalam kurun waktu 14 tahun. Hal ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, namun diperlukan perbaikan agar angka stunting dapat diturunkan lebih cepat dan mencapai target 14% pada tahun 2024 (RPJMN) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, 2022).

Percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Stunting merupakan masalah yang serius karena dapat menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting meningkatkan risiko kematian pada bayi dan anak kecil serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular. Keterlambatan

perkembangan juga menghambat perkembangan keterampilan kognitif, motorik, dan bahasa pada anak (Organisasi Kesehatan Dunia, 2013). Pada saat yang sama, dalam jangka panjang, stunting dapat menyebabkan stunting berlanjut pada generasi berikutnya dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa dewasa (Trihono et al., 2015).

Karena prevalensi yang disebutkan di atas masih lebih dari 20%, target pemerintah untuk tahun 2024 turun menjadi 14,0. Jadi, pemerintah meminta semua orang dan kader untuk memprioritaskan masalah kesehatan ini. Di Indonesia, masalah yang terjadi harus diselesaikan secara terbuka karena kerja sama pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi masalah. Untuk mengatasi stunting, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang baik, pelatihan gizi, dan instruksi tentang pola makan yang seimbang, serta peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan dan sanitasi yang memadai, adalah semua upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Grafik berikut menunjukkan perkembangan prevalensi stunting di Indonesia sejak tahun 2007.



Gambar 1. 1 Prevalensi Balita Stunted dari Tahun 2007-2023

Sumber: Riskesdas dan SSGBI Kemkes RI (2023).

Berdasarkan gambar di atas diperoleh informasi bahwa stunting di Indonesia sudah mengalami penurunan yang signifikan pada 10 tahun terakhir yaitu saat ini Indonesia sudah mencapai 21,6% pada tahun 2023 yang semula 37,2%. Berdasarkan SSGBI yang menyatakan bahwa target pencapaian prevalensi *stunting* dalam RPJMN sebesar 14% hal ini dikatakan cukup tertinggal dengan berbagai negara lain. Sebab, dalam target 2.2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) tertera bahwa seluruh negara sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk mencapai target keberhasilan penanganan *stunting* dan *wasting* di tahun 2025 (United Nations, n.d.). Dengan demikian kondisi prevalensi *stunting* di Indonesia juga tertinggal dibanding beberapa negara tetangga, seperti Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%) (Kemkes RI, 2023).

Adanya permasalahan tersebut, dituangkanlah dalam RPJMN 2020-2024 dalam daftar proyek prioritas yakni no 15 terkait penurunan pravelensi stunting hingga 14%. Namun dalam pelaksanaannya ternyata belum cukup efektif, hal ini berdasarkan data angka stunting di Indonesia masih tercatat tinggi dan mengalami fluktuasi.

Tindakan yang efektif dan efisien diperlukan untuk menangani stunting. Intervensi gizi terdiri dari dua bagian: intervensi gizi spesifik kontribusinya mencapai 30%; dan intervensi gizi sensitive memiliki kontribusi yang signifikan, mencapai 70%, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan umum. Intervensi gizi sensitif pada dasarnya menyasar semua orang, tanpa terkecuali. Intervensi ini mencakup pembangunan dalam bidang non-kesehatan,

seperti penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender, antara lain.

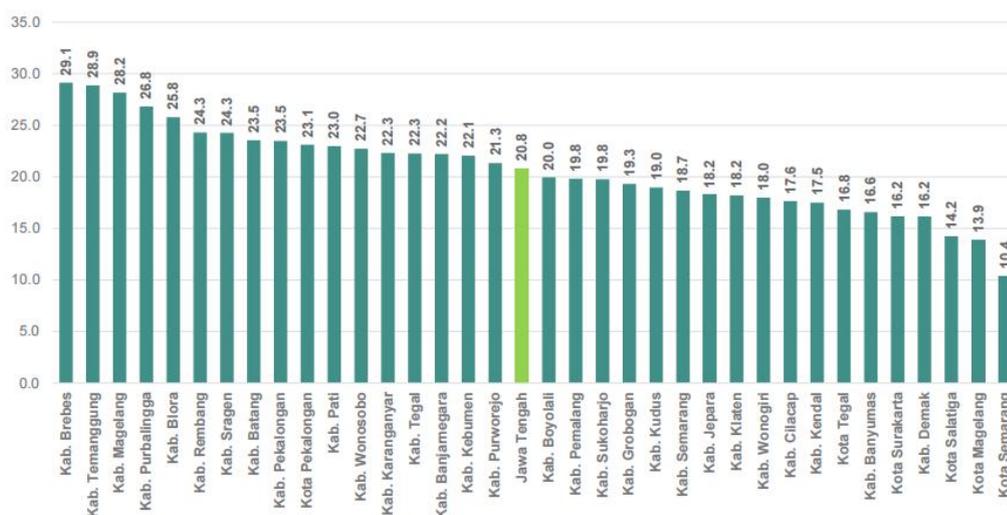
Melihat perbedaan dalam prevalensi stunting di berbagai wilayah sesuai data SSGI (2022), akan sulit untuk meningkatkan penurunan stunting untuk mencapai 14% pada tahun 2024. Untuk mengakhiri stunting di seluruh dunia, diperlukan data nyata tentang kuantitas asli stunting. Ini bukan hanya didasarkan pada prevalensi persentase balita atau jumlah balita yang stunting. Pengukuran jumlahnya dimaksudkan untuk mengukur berapa banyak upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting. Meskipun pengukuran jumlahnya dapat menunjukkan seberapa baik atau buruk suatu kondisi, upaya perbaikan yang dapat dilakukan harus difokuskan pada kondisi kuantitas populasi yang lebih besar atau jumlah sangat memengaruhi perbedaan upaya perbaikan tersebut.

Fenomena stunting adalah salah satu permasalahan pada bidang kesehatan yang utama untuk ditangani (Apriska skk 2022; Rahayu dkk, 2022; Putri dan Nurcahyanto, 2022; serta Herlianti, 2020). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017), stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya lambat dibandingkan anak seusianya. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang integratif melalui koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia sebagai target prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024 dalam upaya untuk mengakhiri stunting. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 memasukkan strategi untuk mengatasi stunting.

Tidak hanya itu, strategi lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menetapkan 12 provinsi prioritas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional. Di antara 12 provinsi tersebut, Jawa Tengah masuk sebagai salah satu daerah prioritas. Lebih lanjut, berikut merupakan capaian angka prevalensi stunting seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah (Gambar 1.2).

Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur)

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, SGI 2022



Gambar 1.2 Angka Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Hasil SSGI, 2022

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Purworejo memiliki angka prevalensi stunting sebesar 21,3% yang dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata stunting di Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini maka, Kabupaten Purworejo menjadi salah satu daerah prioritas stunting yang perlu perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah Kabupaten Purworejo terus

melakukan upaya strategis untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Purworejo. Salah satunya adalah Rembug Stunting dan Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Purworejo 2022. Angka stunting di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 meningkat menjadi 21,3%, menurut data SSGBI.

Tabel 1. 1 Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

No	Tahun	Prevalensi Stunting
1	2022	21,3%
2	2021	15,7%
3	2019-2020	27,6%
4	2018	23,33%

Sumber: Survei Status Gizi Balita Indonesia (2018-2022)

Berdasarkan data pada Tabel-1, dapat diketahui bahwa Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan angka stunting sebesar 5,6% pada tahun 2022-2023. Tentunya hal inilah yang menjadi perhatian banyak pihak karena masalah stunting tidak dapat selesai apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja melainkan penyelesaian permasalahan stunting melibatkan kolaborasi banyak pihak mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting memberikan dasar untuk upaya penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Untuk menurunkan prevalensi stunting, pemerintah melakukan dua jenis intervensi: spesifik dan sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada masyarakat umum melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan. Sebaliknya, intervensi spesifik difokuskan pada

anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan berkaitan dengan sektor kesehatan, dan memiliki jangka waktu pendek.

Upaya percepatan penurunan prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo merupakan persoalan yang kompleks dengan ini tentunya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang berbeda dan bergantung satu sama lain. Setiap pihak yang bertanggung jawab dinilai berperan baik jika mereka melakukan tugas dan fungsi yang sesuai dengan posisi atau jabatan mereka. Mereka juga harus bekerja sama untuk melaksanakan tugas mereka.

Untuk mengakselerasi penurunan tingkat stunting di Kabupaten Purworejo, diperlukan pendekatan yang terfokus dan peka terhadap masalah tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah terdapat Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Di Purworejo sendiri, intervensi spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dengan menyelenggarakan program-program yang secara langsung mengatasi faktor-faktor risiko stunting, seperti gizi buruk, akses terhadap pangan yang berkualitas, sanitasi yang buruk, dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sedangkan intervensi sensitif, mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi stunting, seperti kemiskinan, pendidikan, peran gender, dan kebiasaan makan dan pola asuh dimana di Kabupaten Purworejo dikerjakan oleh OPD lintas sektor seperti Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinpermades Kabupaten Purworejo, Pihak Akademisi, dan pihak pendukung lainnya. Pendekatan ini harus diselenggarakan secara serentak, menyeluruh, dan

menyelaraskan melalui kerja sama yang erat antara Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif, sinergi yang kuat, dan sinkronisasi yang baik antar entitas tersebut menjadi kunci untuk mengimplementasikan intervensi yang berkualitas dan berdampak secara signifikan dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo.

Diharapkan bahwa selain berkolaborasi, setiap stakeholder juga dapat berkomunikasi dengan baik untuk membentuk jejaring yang saling mendukung. Diharapkan bahwa komunikasi dapat membangun kepercayaan dan pemahaman antar-stakeholder, yang berarti bahwa dukungan dan kerja sama akan lebih mudah. Untuk mendukung peran masing-masing stakeholder, komunikasi juga diperlukan. Stakeholder tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika tidak ada komunikasi.

Adanya peningkatan angka prevalensi Stunting dari tahun 2021 yang semula 15,7% menjadi 23,3% di tahun 2022 menandakan bahwa koordinasi antar aktor yang terencana perlu ditingkatkan. Guna terciptanya koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak terutama pemerintah, swasta, dan masyarakat maka diperlukannya kejelasan pembagian ataupun pembatasan jalannya wewenang dan tanggung jawab yang dikomunikasikan sebaik mungkin. Tercapainya target penurunan angka Stunting di Kabupaten Purworejo nantinya tidak hanya buah hasil dari satu instansi saja melainkan atas dasar kolaborasi berbagai pihak sehingga perlu koordinasi antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya.

Berdasarkan temuan terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan prevalensi Stunting yang berkaitan dengan lemahnya koordinasi, sinergitas, dan komunikasi antar aktor. Permasalahan kerja sama antar *stakeholders* yang diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Para *stakeholder* yang terlibat memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda sehingga belum adanya kesamaan visi dan misi. Hal ini seringkali terjadi pada saat pertemuan rapat koordinasi bersama *stakeholder* yang menimbulkan perbedaan pandangan.

Keterlibatan yang dilakukan antar aktor dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Purworejo belum berjalan secara dengan konsisten. Hal ini dapat dilihat dari Dialog tatap muka, upaya membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai pencegahan Stunting. Beberapa masyarakat memandang bahwa Stunting merupakan penyakit genetik yang berasal dari Orang Tua sehingga sulit diubah keadaannya. Kemudian juga adanya keterbatasan latarbelakang pendidikan masyarakat yang menyebabkan penanganan permasalahan menjadi lebih kompleks.

Faktor yang mempengaruhi Kabupaten Purworejo dalam proses kolaborasi penurunan angka prevalensi stunting menarik untuk dianalisis lebih lanjut utamanya terkait dengan bagaimana proses *Collaborative Governance* dijalankan oleh setiap *stakeholders* terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa penelitian terdahulu dapat mendukung pentingnya proses *Collaborative Governance* khususnya dalam penanganan percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2020), Lailia dkk

(2021), dan Rosalia et al. (2022) memiliki kemiripan hasil analisis yang menyatakan bahwa kolaborasi yang melibatkan banyak *stakeholders* sangat diperlukan dalam pelaksanaan program yang mendukung penurunan angka stunting. Lebih lanjutnya, berdasarkan analisis yang telah disimpulkan capaian dari tujuan upaya penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga melibatkan multisektor yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut didukung dengan, Purbani dkk (2019) yang menyatakan bahwa dukungan dan komitmen atas kolaborasi antar *stakeholders* dibutuhkan dalam upaya menajapai tujuan dan saling berkesinambungan dari pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini yang ditekankan yaitu pada percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan berbagai pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi, komitmen, dan dukungan dari multisektor (banyak *stakeholder*) sangat penting dalam pelaksanaan program maupun kebijakan untuk membantu menyelesaikan masalah dan mewujudkan tujuan. Selain itu, analisis proses kolaboratif kepemimpinan dalam pelaksanaan program atau kebijakan pada berbagai bidang kehidupan sangat penting. Dengan demikian, berdasarkan pada berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan analisis mengenai proses *Collaborative Governance* guna menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Mendukung Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?”.

1.7 Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah, berikut:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo.

1.7 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik beserta analisis khususnya mengenai proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo dan memiliki manfaat bagi kepentingan penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik dalam upaya penurunan angka prevalensi Stunting.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (rekomendasi) dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi organisasi perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam pemilihan alternatif kebijakan agar menuntaskan permasalahan Stunting yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi publik mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan strategi dan program penurunan angka Stunting sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada upaya tersebut.

1.7 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan di masa lampau yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti untuk memperkaya teori dalam kajian penelitian dan digunakan sebagai

perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penelitian yang berjudul *Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo* memiliki kebaruan karena belum terdapat penelitian serupa sebelumnya. Sesuai dengan penelitian terdahulu, peneliti mengangkat beberapa penelitian dengan beberapa topik penelitian yang serupa dan menjadikannya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

Artikel oleh (Nurva & Maharani, 2023) yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dengan menggunakan kerangka teoritis yang melibatkan model implementasi kebijakan oleh George Edward III, Marilee S. Grindle, dan Mazmanian & Sabatier. Jenis penelitian ini dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif yang menganalisis dalam konteks segitiga analisis kebijakan. Pengolahan data dilaksanakan melalui metode open coding dengan memanfaatkan perangkat lunak QDA Miner Lite. Adapun hasil dari penelitian ini peneliti menemukan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Namun, meskipun telah ada upaya, masih banyak hambatan yang dihadapi, sehingga kebijakan ini belum mencapai tujuannya. Diperlukan revisi pada Peraturan Bupati (Perbup) tersebut agar

sesuai dengan perubahan terbaru dalam regulasi, yaitu Peraturan Presiden terbaru, yaitu Perpres No.72 tahun 2021.

Selanjutnya, Artikel dari (Purwanti, Widyastuti, & Suminar, 2022) yang berjudul "Kebijakan pencegahan dan strategi penanganan stunting di Kalurahan Donokerto Tari Sleman Yogyakarta." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Donokerto dalam usahanya untuk mencegah kasus stunting pada penduduknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan, dengan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menangani stunting, Pemerintah Kalurahan Donokerto telah mengambil berbagai tindakan, termasuk memberikan penyuluhan oleh kader-kader yang telah dilatih, menerapkan PMT untuk ibu hamil dan menyusui, melakukan pembinaan bagi kader-kader desa, mengadakan forum rembuk stunting, serta meningkatkan fasilitas posyandu untuk mendukung kegiatan dan fasilitas penanganan stunting.

Di antara dua belas jurnal yang diolah oleh peneliti adalah enam jurnal nasional dan lima jurnal internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena memiliki ciri unik. Peneliti percaya bahwa melakukan penelitian menyeluruh tentang *Collaborative Governane* adalah penting. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah publik yang melibatkan banyak *stakeholder*, penerapan *Collaborative Governane* sangat penting

karena memberikan manfaat pada semua pihak tidak hanya kepada pemerintah. Dari penelitian terdalu diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program dan kebijakan, meliputi, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Yang melibatkan juga koordinasi, komunikasi, sinergi, komitmen, dan saling mengakui kehadiran banyaknya aktor bukan hanya pemerintah melainkan juga swasta, akademisi, dan masyarakat.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bidang yang menyelidiki bagaimana lembaga pemerintah menjalankan dan mengelola kebijakan publik. Pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, pembuatan kebijakan, etika administrasi, dan hubungan antar lembaga pemerintah adalah semua bagian dari ini. Administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) sebagai aktivitas dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Administrasi publik mencakup banyak hal, mulai dari pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Dalam konteks ini, administrasi publik berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan publik, memastikan bahwa pelayanan publik bekerja dengan baik dan efektif, dan menjaga bahwa semua orang tahu bahwa urusan publik diurus dengan benar. Chandler dan Plano menekankan betapa pentingnya

administrasi publik untuk menjembatani antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dan kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan, sehingga tercipta pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat (Keban, 2008:4).

Dwightn Waldo (dalam Syafiie, 2006:28) Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia yang peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafiie, 2006: 25) Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Leonard D. White (dalam Indiahono, 2009:3) merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan Administrasi Publik dan meyakinkan bahwa terdapat empat asumsi dasar dari Administrasi Publik, yaitu

1. administrasi adalah suatu kesatuan proses yang dapat dipelajari secara seragam di pemerintah pusat, negara, dan tingkatan lokal;
2. dasar dari studi adalah manajemen, bukan hukum;
3. administrasi adalah bagian dari seni, tetapi transformasi ideal dari ilmu adalah memenuhi dua hal, yaitu mungkin dan bermanfaat;
4. pengenalan administrasi bahwa administrasi telah menjadi dan akan terus berkembang sebagai kajian yang membahas permasalahan dalam pemerintahan modern.

Administrasi publik adalah serangkaian kegiatan kerja sama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinasi sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk

membuat, menerapkan, dan mengelola keputusan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry telah beberapa kali memperbarui artikel review 1975-an, dimana dia mengakui empat paradigma menjadi enam paradigma dalam publikasi terakhir. Namun Peters, berpendapat bahwa tahap - tahap perkembangan mungkin tidak semua mencapai status paradigma seperti yang dijelaskan dalam filsafat ilmu tetapi memang memiliki beberapa karakteristik (baik dan buruk). Jadi, baginya pergeseran paradigma yang jelas ada tiga (Ikeanyibe, Eze Ori, & Okoye, 2017). Menurut Henry Paradigma Administrasi Publik dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dikotomi Politik Administrasi (1900–1926).

Konsep yang dikenal sebagai "dikotomi politik-administrasi" menyatakan bahwa fungsi politik dan administrasi dalam pemerintahan dipisahkan satu sama lain. Pada akhir abad ke-19, Woodrow Wilson mengemukakan gagasan bahwa pejabat politik bertanggung jawab untuk membuat kebijakan publik, sedangkan birokrat atau administrator publik bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan tanpa campur tangan politik. Dikotomi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan rasional, dengan politikus berkonsentrasi pada prinsip dan tujuan kebijakan, dan administrator memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar. Meskipun dikotomi ini menunjukkan bagaimana tugas dibagi, banyak kritikus berpendapat bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan

secara mutlak. Ini karena keduanya seringkali harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik dan memenuhi kebutuhan publik (Basheka dalam Ikeanyibe et al., 2017).

2. Paradigma 2: Asas-Asas Administrasi (1927–1937).

Paradigma kedua dalam studi administrasi publik adalah asas-asas administrasi, yang menekankan prinsip-prinsip fundamental yang membimbing pelaksanaan administrasi publik. Paradigma ini berfokus pada identifikasi dan penerapan prinsip-prinsip yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam administrasi pemerintahan. Asas-asas ini mencakup prinsip-prinsip seperti hierarki organisasi, kesatuan komando, span of control, spesialisasi tugas, dan pembagian kerja yang jelas. Pendekatan ini berusaha menciptakan struktur dan proses yang lebih rasional dan sistematis dalam administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari administrasi dijalankan secara konsisten dan teratur, mengurangi potensi kekacauan dan meningkatkan kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan publik dengan baik. Meskipun paradigma ini menekankan pentingnya struktur dan prosedur, kritik muncul terkait fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika lingkungan yang berubah, serta risiko birokratisasi yang berlebihan (Ikeanyibe et al., 2017).

3. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970).

Henry menggambarkan paradigma ketiga sebagai Administrasi Publik sebagai ilmu politik (1950–1970), yang melihat pemberontakan

ilmuwan politik untuk mengambil kembali Administrasi Publik. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan upaya untuk mengakui disiplin teori manajemen. Menurut Basheka (Ikeanyibe et al., 2017), masa itu dipenuhi dengan penipuan prinsip dan dikotomi politik. Oleh karena itu, dikotomi politik-administrasi tidak konsisten karena politik dan administrasi tidak terpisah. Teori politik menurut Basheka, yang awalnya merujuk pada politik partisan dan korup, berkembang secara ilmiah hingga mencakup pembuatan kebijakan publik pada tahun 1930-an. Pada titik ini, dikotomi tidak dapat dipertahankan (Ikeanyibe et al., 2017).

Menurut Gaus, teori Administrasi Publik berarti di zaman sekarang dapat dikatakan sebagai teori politik juga. Karyanya berisi kritik pencarian Administrasi Publik terdahulu, terutama penggunaan "prinsip." Ia mengamati, apa yang disebut prinsip-prinsip ini mirip dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan rakyat dan pada kenyataannya turunnnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diterima mengingat cara yang longgar dan tidak ilmiah, sehingga tidak dapat dianggap lebih dari peribahasa (International Encyclopedia of the Social Sciences dalam Ikeanyibe et al., 2017).

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956–1970).

Paradigma ketiga dan paradigma keempat muncul hampir bersamaan. Setelah menyadari statusnya sebagai "warga kelas dua" dalam ilmu politik, individu yang bekerja dalam administrasi publik mulai mencari metode alternatif untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu. Bagi banyak sarjana Administrasi Publik, opsi manajemen (kadang-

kadang disebut ilmu administrasi atau manajemen umum) adalah pilihan yang masuk akal. Manajemen sebagai paradigma memberikan fokus, bukan lokus.

Teknik manajemen membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus, tetapi tidak jelas di mana keahlian itu harus diterapkan. Paradigma 4 menunjukkan bahwa administrasi publik tidak lagi unik dalam konteks manajemen yang luas. Jurnal yang sangat penting, *Administrative Science Quarterly*, didirikan pada tahun 1956 dengan asumsi bahwa perbedaan antara administrasi publik, privat, dan nonprofit adalah salah. Edward Litchfield dan John D. Millet adalah tokoh penting selama periode ini.

5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang (NPM)).

Teori ini muncul setelah tahun 1970. Administrasi negara sekarang merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (ilmu politik), dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai subjek penelitian telah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Beberapa departemen, fakultas, dan akademi baru didirikan di bidang administrasi negara dan publik affairs. Terbentuknya asosiasi fakultas nasional (*The National Association of School of Public Affairs and Administration*) adalah salah satu trend perkembangan administrasi negara ini. Lebih dari 200 institusi telah menjadi anggota asosiasi pada tahun 1980, dan pada akhir tahun 1970, lebih dari 25.000 siswa, baik penuh waktu maupun partime, telah mendaftar dalam program *Master of Public Administration* (MPA).

6. Paradigma 6: *Governance* (1990- sekarang).

Paradigma *governance* muncul pada akhir abad ke-20, menandai pergeseran dari pemerintahan hierarkis menuju tata kelola jaringan yang melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, melainkan berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam proses pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. Proses dan mekanisme diutamakan dalam paradigma ini, dengan arti masyarakat dan kelompok dapat mengetahui kepentingannya, melakukan mediasi atas perbedaan pendapat yang muncul, serta melaksanakan hal dan kewajiban yang dimiliki. Selain itu, diharapkan pemerintah juga berperan dalam menciptakan situasi hukum dan politik yang kondusif, sedangkan sektor swasta diharapkan dapat berperan terkait dengan penyediaan lapangan kerja, serta masyarakat dapat menyelenggarakan interaksi sosial secara sehat.

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam paradigma keenam atau paradigma *governance*. Paradigma tersebut menekankan bahwa *stakeholder* harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam penyelesaiannya. Paradigma ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi interaksi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, paradigma *Governance* menjelaskan tentang perkembangan pemerintah ke arah pemerintahan

yang baik atau *Good Governance* melalui penciptaan sinergi antar ketiga pihak tersebut saat melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

1.5.4 Manajemen Publik

Westra dkk (dalam Indradi, 2016) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang menggunakan fasilitas dalam pelaksanaan kerjasama guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Satibi (2012), pengelolaan berbagai sektor publik oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan disebut sebagai manajemen publik. Dengan demikian, fungsi pemerintah yang paling penting adalah menyediakan barang dan layanan publik, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keamanan, dan perlindungan tenaga kerja.

Manajemen publik merupakan usaha serta tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mengelola organisasi serta sumberdaya yang sesuai dengan tujuan organisasi Overman dalam (Keban. 2008: 93). Manajemen publik merupakan riset ilmu yang berasal dari sudut pandang organisasi secara universal yang mempraktikkan penggabungan fungsi-fungsi manajemen antara lain *planning*, *organizing*, *actuating* serta *controlling*. Dalam Administrasi Publik, ada dua konsentrasi yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik merupakan sesuatu seni/ilmu mengelola, mengendalikan serta mendelegasikan wewenang yang terdapat di dalam organisasi publik atas prinsip-prinsip

manajemen. Sebaliknya kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dirumuskan yang nantinya akan diimplementasikan oleh seseorang Manajer Publik guna memecahkan persoalan-persoalan publik.

Stoner (dalam Handoko, 2011:8) mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan masalah publik dengan menerapkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dikenal sebagai manajemen publik (Sahya Anggara, 2016:545). Pertumbuhan era yang terus berjalan menyebabkan paradigma manajemen publik menghadapi sedikit perpindahan. Paradigma manajemen publik diawali dengan paradigma *Old Public Administration* ataupun biasa disebut dengan OPA yang berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM). Kemudian, yang terakhir merupakan *New Public Service* yang cenderung lebih menekankan pada mutu pelayanan publik. Lahinya paradigma ini dilatarbelakangi oleh adanya kritikan terhadap dua paradigma lebih dahulu yang belum berakibat pada menurunnya kesejahteraan warga dan memunculkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat disini memiliki peran sebagai client atau customer seperti yang tergambar dalam paradigma OPA serta NPM serta bukan seseorang masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan tanpa memandang latar balik status sosial yang dipunyai.

Pelayanan publik bukan hanya menanggapi reaksi terhadap permintaan pelanggan, tetapi bagaimana membangun ikatan yang baik serta membangun keyakinan antara pemerintah dengan rakyatnya, Formulasi kepentingan publik dapat dimainkan oleh seluruh aktor baik negeri, swasta ataupun warga sipil. Berdasarkan hal tersebut menjadikan paradigma NPS disebut sebagai bagian dari paradigma *governance*. Paradigma ini mangulas betapa berartinya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*) serta jaringan (*networking*) yang terjalin diantara banyak *stakeholder* dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

1.5.5 Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash (dalam Tilano dan Suwitri, 2019: 5) *Collaborative Governance* merupakan serangkaian kegiatan kerja sama untuk menjamin pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka menangani persoalan-persoalan publik, lembaga publik, dan entitas terkait secara langsung dan tidak langsung. Menurut O'Flynn dan Wanna, konsep *Collaborative Governance* mengacu pada sekelompok pemangku kepentingan yang bergantung satu sama lainnya dan berasal dari berbagai industri yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dan situasi yang dianggap rumit (dalam Supriyanto et al., 2021).

Collaborative Governane menurut Emerson adalah suatu proses manajemen yang terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah tujuan (dalam Molla et al.,

2021). Sedangkan, menurut Dwiyanto (dalam Molla et al., 2021) dalam *Collaborative Governance* terjadi komunikasi tentang visi, misi, dan strategi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara mandiri dan mempunyai otoritas pengelolaan sesuai dengan konsensus bersama.

Collaborative governance merupakan sebuah pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan warga. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa permasalahan publik yang kompleks saat ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan dan sinergi dari berbagai pihak.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan strukturproses di mana aktor-aktor publik dan non-publik bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah yang tidak dapat ditangani sendiri, lalu merumuskan dan mengimplementasikan solusi lintas batas organisasi. Menurut Fendt (dalam Arrozaq, 2016) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu (1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu secara mandiri tanpa bantuan pihak lain; (2) Dengan kolaborasi, organisasi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja mandiri; (3)

Dengan kolaborasi, organisasi dapat mengurangi biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing tinggi. *Collaborative Governance* mendorong pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi masalah yang kompleks secara efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Bryson dkk; 2006).

Sementara itu, Ansell dan Gash (2008) melihat *collaborative governance* sebagai pengaturan di mana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Mereka menekankan pentingnya membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara sebagai faktor keberhasilan kolaborasi.

Dalam *collaborative governance*, proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dilakukan secara kolaboratif melalui forum-forum partisipatif yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang lebih komprehensif, legitimate, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip utama *collaborative governance* mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, pembagian kekuasaan, dan konsensus. Pendekatan ini mengutamakan dialog, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang secara kolektif.

Proses kolaboratif ini melibatkan negosiasi, berbagi perspektif, dan pembagian tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan.

Masing-masing pihak memberikan kontribusi berdasarkan keahlian, sumber daya, dan kepentingan mereka, dengan tujuan mencapai solusi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun *collaborative governance* memiliki tantangan seperti koordinasi antar pihak, manajemen kepentingan yang beragam, dan membangun kepercayaan, pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas kebijakan, legitimasi, dan efektivitas implementasi. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya, solusi yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Dalam lingkungan yang semakin kompleks dan terhubung, *collaborative governance* menawarkan sebuah cara untuk mengatasi masalah publik secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan kekuatan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan yang terlibat.

1.5.5.1 Model Collaborative Governance

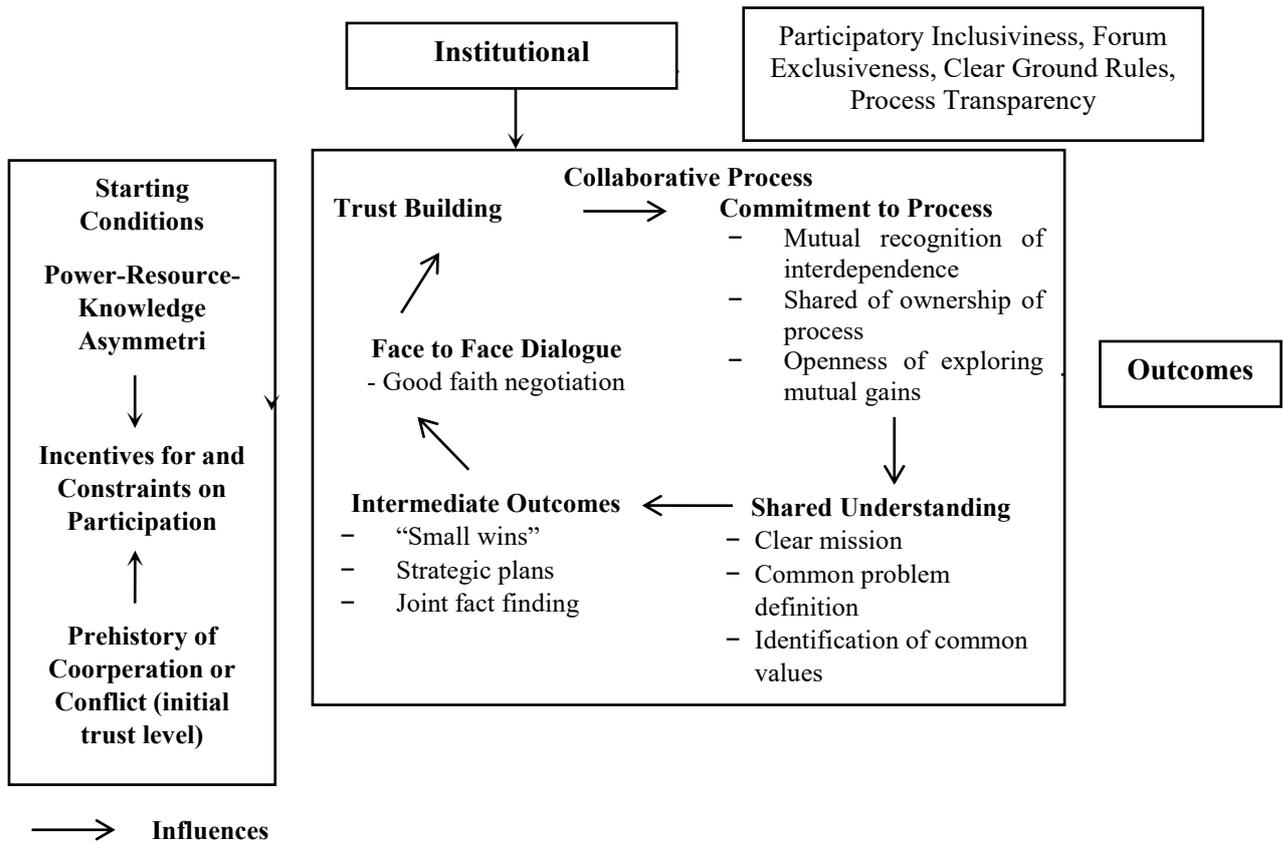
Model *collaborative governance* berupaya menggambarkan proses dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah. Salah satu model yang banyak dirujuk adalah Model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008).

Dalam model ini, terdapat empat variabel utama yang saling terkait dan memengaruhi keberhasilan *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan, dan proses

kolaboratif itu sendiri. Kondisi awal mencakup tingkat konflik, sumber daya, kepercayaan, dan tingkat konflik sebelum kolaborasi dimulai. Desain institusional meliputi inklusi pemangku kepentingan, aturan prosedural, dan transparansi. Kepemimpinan berperan penting dalam menginisiasi, memfasilitasi, dan mempertahankan proses kolaborasi. Sementara proses kolaboratif melibatkan dialog, membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

Model ini menekankan bahwa faktor-faktor tersebut saling terkait dan perlu dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pembelajaran sosial, dan perubahan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan publik yang kompleks.

Gambar 1.3 Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash



Gambar 1.1 Model Kerangka Kerja Collaborative Governance

Sumber : Ansell dan Gash (2008)

Terdapat 4 macam model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash :

- (1) Kondisi Awal menurut Ansell and Gas merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh untuk mencapai keberhasilan proses kolaborasi. Kondisi awal merujuk pada situasi dan konteks yang ada sebelum proses kolaborasi dimulai, yang meliputi beberapa faktor kunci. Ansell dan Gash menekankan bahwa kondisi awal ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena akan memengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku para pemangku kepentingan dalam terlibat dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan memobilisasi sumber daya

yang diperlukan seringkali menjadi langkah awal yang penting sebelum proses kolaborasi dapat dimulai dengan efektif.

- (2) Kepemimpinan Fasilitatif, Ansell *and* Gash menerangkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam sebuah upaya kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif harus memiliki kemampuan untuk: (a) Memberdayakan para pemangku kepentingan secara aktif dan luas; (b) Memfasilitasi dalam kolaborasi salah satunya dengan menyediakan kebutuhan dalam kegiatan kolaborasi kesejahteraan aktor terlibat; dan (c) Menjaga proses kolaborasi dapat berjalan efektif melalui proses pengawasan kegiatan kolaborasi.
- (3) Desain Kelembagaan. Desain kelembagaan atau institusional diperlukan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi. Ansell and Gash (2008) (dalam Bichler & Losch, 2019) mengakui bahwa desain institusional menjadi bagian dari *Collaborative Governance* dan menganggapnya sebagai protokol dasar. Desain institusional menegaskan aturan main kolaborasi termasuk aturan siapa yang disertakan, aturan pembentukan forum, bentuk dari aturan kolaborasi yang jelas dan transparansi dalam aturan kolaborasi (Astuti, dkk, 2020:77). Proses desain institusional diharapkan berorientasi kepada konsensus yang disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat guna dan tujuan adanya kolaborasi yang dilakukan. Ansell and Gash (2008:557) mengemukakan bahwa pentingnya konsensus untuk menciptakan aturan yang jelas, transparan, dan meyakinkan bagi pelaku kepentingan yang terlibat (Tilani & Suwitri, 2019). Untuk menjelaskan dimensi ini terdapat indikator yang dapat dilihat dari

desain institusional yaitu: (a) Aturan dasar yang jelas yang berbentuk peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi yang baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan (b) Transparansi dalam aturan kolaborasi yang merupakan salah satu bentuk adanya aturan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

(4) Proses Kolaboratif.

Dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008) bahwa proses kolaboratif terdiri dari:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*).

Segala bentuk dari kolaborasi dibangun dari proses dialog tatap muka yang merupakan proses berorientasi pada konsensus. Dialog tatap muka tidak hanya sebagai media dalam melakukan negosiasi diantara pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi bagian yang mengawali dari proses membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, dan berbagai pemahaman untuk mencapai hasil kolaborasi. Dialog tatap muka dalam kolaborasi setidaknya tidak hanya dilakukan sekali tetapi perlu dijalankan secara rutin dan perlu adanya komunikasi yang baik dalam proses dialog tatap muka tersebut untuk memecahkan stereotip dan hambatan yang muncul (Alfiandri, dkk, 2019:44).

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*).

Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya membangun kepercayaan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan collaborative governance. Kepercayaan dipandang sebagai elemen penting dalam proses kolaboratif karena dapat memfasilitasi kerja sama, berbagi informasi, dan

pencapaian kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Kepercayaan tidak hanya penting pada tahap awal collaborative governance, tetapi juga perlu dipelihara dan dikembangkan secara terus-menerus selama proses kolaborasi berlangsung. Hal ini dapat mendorong komitmen dan partisipasi yang lebih efektif dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*).

Menurut Ansell and Gash tanpa adanya komitmen yang dipegang dari pemangku kepentingan maka proses kolaborasi tidak akan berjalan maksimal bahkan akan mengalami kegagalan. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa masing-masing pihak bersedia untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan upaya yang diperlukan dalam proses kolaborasi yang seringkali panjang dan kompleks.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*).

Ansell and Gash (2008) mengemukakan bahwa proses kolaboratif, setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus bersedia untuk berbagi pemahaman yang dimilikinya terkait hal yang dapat dicapai oleh para pemngku kepentingan melalui pelaksanaan kolaborasi termasuk berbagi tujuan bersama, tujuan jelas, arah dan strategi yang jelas. Dalam pelaksanaan *collaborative governance*, juga penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman bersama terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi bersama-sama sebagai upaya untuk menghasilkan penyelesaian masalah. Dengan saling berbagi pemahaman berimplikasi pada konsensus atas persetujuan dalam menafsirkan dan menguraikan suatu permasalahan.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara ini dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi jangka panjang. Menurut Ansell dan Gash, terdapat tiga jenis hasil sementara utama yang perlu dicapai selama proses collaborative governance, yaitu:

1. Membangun kepercayaan (*building trust*) kepada seluruh aktor terlibat (*stakeholders*). Kepercayaan merupakan elemen krusial untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan kerjasama yang lebih erat.
2. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dari para aktor terlibat. Mereka harus memiliki kemauan dan keterlibatan aktif dalam keberlanjutan proses kolaborasi.
3. Pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai permasalahan dan langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Pemahaman bersama ini penting untuk menjembatani perbedaan perspektif dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan.

Ansell dan Gash berpendapat bahwa pencapaian hasil sementara ini dapat memfasilitasi pembelajaran sosial dan membangun kapasitas kelembagaan untuk kolaborasi yang lebih efektif. Namun, mereka juga mengakui bahwa pencapaian hasil sementara ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses collaborative governance yang kompleks.

1.5.5.2 Faktor Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Menurut *Government of Canada Collaborative Governance* (2008) dapat terhambatnya proses *collaborative governance* disebabkan oleh faktor berikut ini:

(1) Faktor Budaya

Faktor budaya tentunya berperan penting dalam proses *collaborative governance*, yang merupakan pendekatan di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama dan membuat keputusan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak mampu mengambil risiko dapat menyebabkan kegagalan dalam berkolaborasi. Kecenderungan budaya untuk bergantung pada prosedur dan ketidakmampuan untuk mengambil risiko dapat menjadi hambatan serius dalam menciptakan kolaborasi yang efektif.

Ketika pelayan publik dan pemimpin memiliki ketergantungan yang kuat pada prosedur yang ada dan merasa tidak nyaman dengan risiko, ini bisa membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan untuk menjalankan inovasi yang diperlukan dalam kolaborasi. Terwujudnya kolaborasi tentunya penting bagi pelayan publik dan pemimpin untuk memiliki keterampilan dan kesiapan untuk memasuki kemitraan dengan sikap yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Merujuk pada hal tersebut dalam kolaborasi, penerapan

konsep *top-down* oleh pemerintah dapat menyebabkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan keberhasilan kolaborasi.

(2) Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terjadi disebabkan oleh adanya kecenderungan dari institusi yang terlibat kolaborasi bagi aktor pemerintah yang cenderung menerapkan struktur hierarkis. Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas sehingga tidak memerlukan aturan ketat secara formal serta juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilaksanakan dalam keseharian atau mengacu pada aturan atau SOP yang berlaku. Sebuah kolaborasi di antara berbagai *stakeholders* pemerintah atau lembaga dapat terjadi ketika ada kesadaran akan kebutuhan bersama atau tujuan yang saling mendukung, bahkan jika struktur hierarkis dalam institusi masing-masing tetap ada

Dalam kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan non-pemerintah, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka dan berbagi keahlian antara berbagai pihak. Pendekatan yang lebih horizontal memungkinkan berbagai entitas untuk berkontribusi secara aktif, menggabungkan pengetahuan dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini sering kali memerlukan pembangunan jaringan, memperkuat kemitraan, dan memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka. Dalam kolaborasi, transparansi dan pertanggungjawaban yang baik antara berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi institusi publik untuk memperbarui praktik-praktik

akuntabilitas mereka agar sesuai dengan dinamika kerja sama lintas sektor yang lebih kompleks dan terbuka.

(3) Faktor Politik

Faktor politik memiliki peran yang signifikan dalam proses collaborative governance, yang merupakan pendekatan untuk mengelola isu-isu publik melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kegagalan dalam kolaborasi seringkali dipicu oleh kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam menghadapi tujuan politik yang rumit dan dapat memicu konflik. Melalui kolaborasi, konflik tujuan yang biasanya terjadi karena berbagai kelompok kepentingan dapat dikurangi. Namun demikian, kolaborasi juga rentan terhadap perubahan kesepakatan dan kepentingan antara para pihak yang terlibat, yang bisa berujung pada kegagalan kolaborasi. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan pihak terlibat untuk terus berinovasi, berkomunikasi dengan baik, dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi kolaborasi mereka untuk menghindari kegagalan.

1.5.6 Stunting

Stunting merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dimana kondisi tinggi badan dan berat badan seorang anak lebih rendah dari teman seusianya. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan gizi atau sering disebut dengan malnutrisi (Candra, 2020). Stunting sendiri dapat menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan perkembangan otak, sensor motorik, pertumbuhan, dan perkembangan mental anak yang terlambat (Rahayu et al, 2018).

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa pengukuran berat badan dan tinggi badan anak secara rutin dapat berguna sebagai upaya monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak yang apabila hasilnya lebih rendah daripada seusianya maka dapat menyebabkan stunting. Dengan pengukuran inilah dapat dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang ditetapkan pada tahun 2018, dilindungi oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, undang-undang ini akan membantu memperkuat kerangka intervensi yang ada dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Ini akan menjadi target berkelanjutan hingga tahun 2030, berdasarkan capaian tahun 2024. Rencana Aksi Nasional akan dibuat berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, yang akan mendorong dan mendorong konvergensi program melalui pendekatan keluarga beresiko stunting. Peraturan ini juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Oleh karenanya, Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 membutuhkan adanya Proses *Collaborative Governance* sebagai upaya mewujudkan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pencegahan dan penanganan stunting dapat dilakukan melalui pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi spesifik menasar penyebab langsung stunting,

seperti kekurangan asupan makanan, gizi, dan penyakit infeksi, dan merupakan intervensi lintas program kesehatan. Intervensi sensitif dilakukan oleh organisasi lintas program kesehatan.

Terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah. Stunting menurut peraturan ini adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada balita, yaitu terlambatnya perkembangan otak, fisik, dan organ lainnya yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang ditandai dengan tubuh seorang anak lebih pendek daripada teman seusianya. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang penurunan angka stunting ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak usia dibawah dua tahun (baduta) dan anak usia dibawah lima tahun (balita) di daerah kabupaten dan kota hingga berada dibawah 20% melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan stunting.

Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting adalah instrumen atau upaya pendekatan intervensi yang digunakan secara terpadu, terkoordinir, dan terpadu dalam upaya penanganan stunting. Aksi konvergensi ini mencakup:

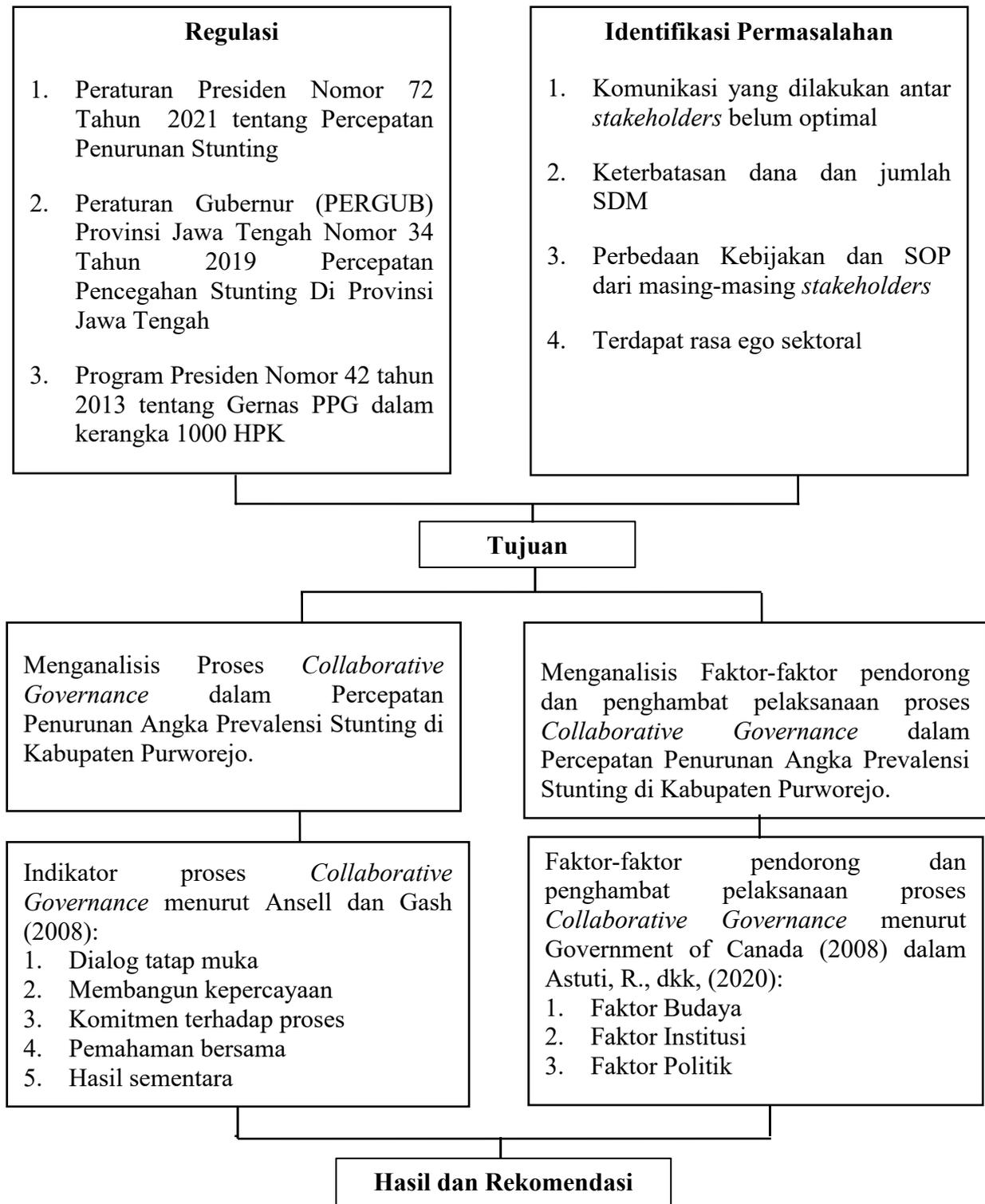
1. Analisis situasi program penurunan stunting
2. Penyusunan rencana kegiatan
3. Rembuk stunting
4. Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota
5. Pembinaan kader pembangunan manusia
6. Sistem manajemen dan data stunting

7. Pengukuran dan publikasi stunting
8. Review kinerja tahunan

Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG), yang ditetapkan dalam kerangka 1000 HPK melalui Program Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG. Pada tingkat kebijakan, pemerintah pasti akan memberikan perhatian khusus dan signifikan pada pencegahan stunting. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 memasukkan indikator dan target pencegahan stunting ke dalam sasaran pembangunan nasional.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1. 4 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini dilatarbelakangi pada belum maksimalnya pemanfaatan program yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemangku kepentingan terhadap masyarakat prioritas stunting yang menyebabkan tingginya angka prevalensi stunting. Kemudian juga digunakan sebagai pengkajiian proses kolaborasi *stakeholders* yang turut terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo menggunakan model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007). Selain itu juga melihat apa yang menjadi faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

1.7.1 Proses Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

Collaborative Governance dalam kebijakan yang dilakukan sebagai upaya penurunan Stunting Kabupaten Purworejo melalui kolaborasi Ansell and Gash, yaitu:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka adalah proses komunikasi langsung dan interaksi secara fisik antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Proses ini meliputi pertemuan-pertemuan, diskusi, dan musyawarah untuk mengetahui siapa saja *stakeholders* yang terlibat, kapan pelaksanaan diskusi, bagaimana itikad negosiasi yang baik, bagaimana bentuk diskusi yang dilakukan pihak-pihak terkait, dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan diskusi antar *stakeholders* sebagai

upaya mewujudkan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan Stunting. Dialog tatap muka ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi kesalahpahaman, membangun kepercayaan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menyusun rencana aksi kolaboratif secara bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Proses ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memantau kemajuan, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam masalah stunting.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Rasa Kepercayaan antar *stakeholders* sangat diperlukan dalam kolaborasi. Kunci utama dalam proses ini tentu saja didasari juga oleh kepercayaan yang besar harapannya mampu mengawal kolaborasi hingga mencapai target sasaran. Setiap aktor dan OPD yang terlibat dalam penurunan Stunting di Kabupaten Purworejo harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin dan disertai juga dengan kehadiran pimpinan yang tidak egosentrisme. Aspek yang diamati dalam membangun kepercayaan selama proses kolaborasi ini adalah Komunikasi yang efektif, mendengarkan semua pihak, dan mengelola konflik secara adil; transparansi dengan berbagi informasi terkait data stunting, program, dan upaya yang sudah dilakukan secara terbuka; serta visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo.

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi (*Commitment to The Process*)

Dalam proses collaborative governance untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Purworejo, komitmen kuat dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat menjadi landasan penting bagi keberhasilan kolaborasi. Komitmen ini mencerminkan kesungguhan serta tanggung jawab masing-masing aktor dalam melaksanakan peran dan tugasnya selama proses kerjasama berlangsung. Salah satu aspek penting yang diteliti adalah sistem dan mekanisme yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan, bertukar informasi, dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Adanya saling ketergantungan antara para aktor dalam mewujudkan kebijakan penurunan prevalensi stunting juga menjadi faktor penting. Selain itu, para pemangku kepentingan harus menyepakati tujuan dan strategi kolaboratif yang akan ditempuh bersama.

Komitmen terhadap proses kolaboratif juga mencakup ketaatan pada prosedur dan protokol yang telah ditetapkan untuk pengambilan keputusan, komunikasi, dan penyelesaian konflik dalam konteks kerjasama. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif, termasuk berkontribusi dalam diskusi, memberikan masukan, dan bekerja sama secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terjadinya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Shared understanding pada proses *collaborative governance* penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo merujuk pada kesepakatan dan kesamaan pandangan antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat umum terkait akar penyebab stunting, dampaknya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Para pemangku kepentingan juga perlu menyepakati pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kolaborasi dengan tetap berpedoman pada aturan dan SOP yang berlaku. Dengan adanya kesamaan paham dan persepsi di antara para pemangku kepentingan, proses kolaboratif akan lebih mudah dijalankan secara efektif dan terkoordinasi. Hal ini akan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Purworejo.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara adalah tujuan dari proses kolaboratif. Capaian hasil pada tahap ini belum bisa dinyatakan sebagai hasil akhir dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo melainkan seberapa jauh hasil yang telah bisa dilihat dari keberjalannya sebuah kebijakan dan program. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan melakukan upaya evaluasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai apakah berdasarkan hasil dan dampak yang ditimbulkan, tujuan kolaborasi dalam kebijakan Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo dapat dianggap tercapai atau belum. Penilaian dilakukan dengan melihat pencapaian *small*

wins atau cita-cita jangka pendek yang menjadi target awal dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perkembangan yang diperoleh sudah cukup signifikan meskipun masih belum stabil, maka proses kolaboratif perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat menjaga konsistensi penurunan angka stunting. Strategi dan pendekatan kolaboratif harus disesuaikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakstabilan, sehingga tujuan akhir dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.7.2 Faktor Penghambat Proses Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pada penelitian ini akan diidentifikasi berdasarkan faktor penghambat proses collaborative governance menurut Government of Canada (2008) dalam Astuti, R., dkk. (2020), yaitu:

1. Faktor Budaya

Faktor budaya dapat memainkan peran penting dalam menghambat atau memfasilitasi proses collaborative governance untuk mempercepat penurunan stunting. Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, yang melibatkan berbagai faktor termasuk gizi, sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, praktik makanan, dan faktor sosio-ekonomi. Salah satu faktor budaya yang ditemukan di Kabupaten Purworejo dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting yaitu tentang orientasi dari pelayanan, keharmonisan, sinergi, serta akuntabilitas yang dilakukan oleh *stakeholders* percepatan penurunan stunting.

2. Faktor Institusi

Kecenderungan institusi, terutama di pihak pemerintah, untuk menerapkan sistem hierarkis dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan kolaborasi. Sistem hierarkis cenderung menempatkan otoritas dan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur organisasi, sehingga menyulitkan komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan yang cepat, dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Pada proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo masih terdapat OPD yang kaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat kurang memahami bagaimana cara yang lebih fleksibel dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu pengentasan stunting di Kabupaten Purworejo.

3. Faktor Politik

Kegagalan dalam kolaborasi seringkali dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inovasi yang kurang dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang kompleks. Faktor politik memainkan peran penting dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui proses *collaborative governance*. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Pada proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo masih kurang maksimalnya peran dukungan kolaborasi dari

pihak pemerintah serta kurang antusiasme masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dilakukan pemerintah.

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Parameter
Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo	Dialog Tatap Muka	Siapa saja stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi
		Tingkat partisipasi dan keterwakilan dari berbagai kelompok kepentingan dalam pertemuan
		Kapan pelaksanaan diskusi dalam kolaborasi
		Cakupan pembahasan isu-isu substantif terkait penyebab, dampak, dan upaya penurunan stunting
		Bagaimana bentuk dan cara diskusi yang dilakukan dalam kolaborasi
	Mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi keputusan yang diambil	
	Membangun Kepercayaan	Komunikasi dan keterbukaan informasi antar Pemerintah Daerah dengan <i>stakeholders</i>
		Frekuensi pertemuan dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program
		Pemenuhan tanggung jawab dan alokasi sumber daya dari masing-masing pemangku kepentingan
		Ketersediaan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik
		Upaya untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat
	Komitmen dalam Proses Kolaborasi	Pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama secara konsisten dan berkelanjutan
		Adanya kebijakan atau regulasi yang mendukung kolaborasi
		Kesiapan untuk mengalokasikan sumber daya secara berkelanjutan untuk mendukung program
		Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang disepakati bersama
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam		

Fenomena	Sub Fenomena	Parameter
		proses monitoring dan evaluasi program
	Pemahaman Bersama	Kesepakatan bersama tentang visi, tujuan, dan target yang ingin dicapai dalam kolaborasi
		Pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya penurunan stunting
		Kesepakatan tentang permasalahan kunci yang harus ditangani
		Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman bersama dalam kolaborasi
		Tujuan dan arah strategis dari kebijakan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo
	Hasil Sementara	Cita-cita jangka pendek (small wins) yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo
		Adanya target atau indikator kinerja antara yang disepakati
		Mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan program secara berkala dan menyesuaikan strategi
		Adanya insentif atau dukungan yang berkelanjutan untuk mempertahankan komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan
		Pemanfaatan hasil sementara untuk meningkatkan dukungan dan legitimasi dari pemangku kepentingan lainnya
Faktor Penghambat Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi	Faktor Budaya	Orientasi pelayanan dalam berkolaborasi
		Keharmonisan dalam kolaborasi
		Loyalitas dalam pelaksanaan program
		Akuntabilitas <i>stakeholders</i>
		Sinergi yang dibangun dalam kolaborasi
	Faktor Institusi	Bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi
		Kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah
		Struktur institusi yang bersifat vertikal atau hirarki
	Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung	

Fenomena	Sub Fenomena	Parameter
Stunting di Kabupaten Purworejo		proses kolaborasi
		Partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses kolaboratif
		Mekanisme pengambilan keputusan dalam kolaborasi
		Keberadaan SOP sebagai acuan kolaborasi
	Faktor Politik	Inovasi dari pimpinan dalam mencapai tujuan politik yang dianggap kontradiktif dan kompleks
		Komitmen dan dukungan dari pejabat/pemimpin politik terhadap proses kolaborasi
		Mekanisme pengelolaan dan resolusi konflik dalam proses kolaborasi
		Transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi
		Kekuatan politik dan intervensi dari para <i>stakeholders</i>

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang proses kerja sama pemerintahan yang terjadi dalam upaya untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena kolaborasi yang melibatkan beragam orang dalam proses tersebut.

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, perspektif,

dan interpretasi orang-orang yang terlibat dalam proses *collaborative governance* tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang lengkap, mendalam, dan kontekstual tentang bagaimana kerja sama pemerintahan digunakan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan kolaboratif multi-pihak, hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien untuk mengatasi masalah stunting.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo. Kemudian, fokus dari penelitian merupakan sebuah pusat perhatian dari apa yang diteliti sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Dengan ini, fokus penelitian yang diambil oleh penulis adalah peran *stakeholders* percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek disebut informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi terkait data yang diinginkan peneliti untuk digunakan dalam penelitian. Situasi dan kondisi latar belakang penelitian adalah contoh dari jenis informasi ini.

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel purposive digunakan untuk memilih informan. Metode pengambilan sampel ini melibatkan pengambilan sampel dari sumber data yang dianggap memiliki

pemahaman yang paling kuat tentang apa yang diharapkan dari subjek dan situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memilih beberapa informasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah
 - i. Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai Perencana sekaligus Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan.
 - ii. OPD Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo.
 - iii. OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten Purworejo.
 - iv. OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 - v. Tim Pakar dan Tim Teknis/Lapangan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purworejo.
- b. Akademisi
 - i. Mahasiswa Forum Genre Universitas Muhamadiyah Purworejo
- c. Masyarakat
 - i. Forum Genre Kabupaten Purworejo.
 - ii. Anggota Kampung KB di Kabupaten Purworejo.
 - iii. Keluarga potensi stunting di Kabupaten Purworejo pada daerah prioritas Stunting Purworejo berdasarkan data DinsosdukKB.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Menurut Moleong (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, serta data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Karena penelitian ini

menggunakan banyak sumber data, peneliti harus benar-benar memahami data dan asal sumbernya karena jika ada kesalahan, hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan.

1) Data primer

Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh secara langsung dari sumber data asli di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan diskusi kelompok terfokus. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif meliputi informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena yang diteliti. Data primer menyediakan informasi yang kaya, rinci, dan kontekstual mengenai sudut pandang, interpretasi, dan makna yang diberikan oleh para partisipan terhadap isu atau fenomena yang diteliti.

2) Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber lain disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder dapat berupa dokumen tertulis seperti laporan, artikel, buku, jurnal, arsip, catatan rapat, peraturan atau kebijakan terkait, dan berbagai jenis dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder juga dapat berupa data statistik, data visual seperti foto atau video, ataupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif terkait proses collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut, seperti perwakilan dari instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pihak swasta. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran, persepsi, tantangan, dan faktor-faktor keberhasilan dalam proses kolaborasi yang terjadi.

Selain itu, observasi lapangan (field observation) juga dilakukan untuk mengamati secara langsung dynamic dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam forum-forum kolaboratif yang diselenggarakan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data mengenai proses, mekanisme, dan iklim kolaborasi secara lebih rinci.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting seperti notulen rapat, laporan kegiatan, peraturan daerah, dan publikasi terkait upaya penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Data sekunder ini berguna untuk melengkapi dan memperkaya data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data kualitatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang utuh dan mendalam mengenai proses collaborative governance dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup membuat keputusan tentang apa yang harus dipelajari, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit, sintesis, pembuatan pola, dan mencapai kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data dipelajari sebelum, saat, dan setelah penelitian.

Studi ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data (Sugiyono, 2017: 133). Mereka mengklaim bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan berlanjut hingga data menjadi jenuh atau jenuh. Proses berikut digunakan untuk menganalisis data dari model Miles dan Huberman:

1. Pengumpulan Data

Dalam proses ini, data penelitian dikumpulkan dalam jangka waktu panjang atau pendek. Data penelitian kualitatif dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, atau kombinasi keduanya melalui triangulasi.

2. Reduksi Data

Langkah pertama dalam proses ini adalah mencatat data lapangan secara menyeluruh. Setelah itu, data dianalisis melalui reduksi data, yang merupakan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal

penting serta mencari tema dan polanya. Hasil dari proses ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan mencari data tambahan jika diperlukan. Teori dasar dan tujuan yang ingin dicapai selama proses reduksi data akan membantu peneliti.

3. Penyajian Data

Tujuan penyajian data adalah untuk membuat orang lebih mudah memahami dan merencanakan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang apa yang terjadi. Contoh penyajian data termasuk hubungan antar kategori, bagan, uraian singkat, atau *flowchart* lainnya. Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dikombinasikan dengan bagan, grafik, matriks, dan jejaring kerja (*network*). (dalam Sugiyono, 2017:137).

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dari proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, hasil yang dihasilkan dari penelitian memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi juga memungkinkan untuk tidak menemukan jawaban. Dalam penelitian kualitatif, masalah dan rumusnya masih sementara dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sehingga penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru.

1.9.7 Kualitas dan Validasi Data

Data dalam penelitian perlu diuji keabsahannya. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Uji kredibilitas merupakan pengujian terhadap kepercayaan data hasil penelitian kualitatif. Untuk uji kredibilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan, dikategorikan berdasarkan pandangan yang sama dan yang berbeda, serta hal-hal spesifik dari masing-masing sumber. Setelah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan, dilakukan konfirmasi dengan sumber data untuk mendapatkan kesepakatan atas kesimpulan tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Pengujian kredibilitas data juga dapat dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan metode yang berbeda. Jika metode ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus berbicara dengan sumber lain untuk memastikan mana yang dianggap benar atau apakah semua data benar.

3. Triangulasi Waktu

Pengujian kredibilitas data juga dapat dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber menggunakan metode yang berbeda. Jika metode ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus berbicara dengan sumber lain untuk memastikan kebenaran data tersebut.